BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1 Hasil Penelitian

4. 1. 1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman yang terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan oleh Perancis diterapkan pula oleh Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia yang saat itu dikenal dengan "*Oor Longs Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dipakai pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki oleh tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana di kemudian hari penjajah Jepang ditarik dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspeti van Vinancian*" yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian 15 Agustus 1942, nama tersebut diganti menjadi "*Kantor Inspeksi Keuangan*" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan tentara keamanan rakyat berevakuasi.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah, beralamat di Jalan Purnawarman no. 21 Bandung dengan Kepala kantor yaitu Drs. Untung Rivai. Sejak berlakunya keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung terbagi atas Tiga Kantor Inspeksi Pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1998 nomor Kep-276/KMK.01/1998, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka

dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung telah menjadi enam KPP.

Pada bulan Maret 2006 Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat Bagian II membawahi sembilan KPP meliputi lima KPP di Bandung, yaitu terdiri dari :

1. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372
3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21
4. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No. 216
5. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 781

Dan empat KPP lannya yaitu terdiri dari :

1. KPP Cimahi
2. KPP Tasikmalaya
3. KPP Sukabumi
4. KPP Cianjur

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan Pengawasan Potensi Perpajakan memutuskan bahwa KPP Bandung Cibeunying yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujung Berung dipecah menjadi dua KPP, yaitu KPP Bandung Cibeunying sebagai KPP lama dan KPP Bandung Cicadas sebagai KPP baru dengan wilayah meliputi : Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Cicadas, Ujung Berung, dan Cimenyan. Sedangkan Cimenyan adalah semula masuk wilayah KPP Cimahi.

KPP Bandung Cicadas menempati sebuah Gedung baru berlantai empat yang semula diperuntukkan untuk Kanwil IX DJP Jawa Barat II. Sebagai KPP baru, Kepala Kantornya dilantik pada tanggal 24 Februari 2002 dan Kasie Kasubag Umum serta Kepala KP4 dilantik pada bulan April 2002, dan untuk sementara sambil melakukan pembenahan gedung baru tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas berkantor di aula Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

Karena gedung baru tersebut belum ada *Lay-out* dan partisi, maka didesain sendiri bekerjasama dengan para Kasie, khususnya Ibu Kasubag Umum dengan konsep mengutamakan dan memudahkan pelayanan, kenyamanan, keamanan, keindahan, keterpaduan antar seksi, dan keterbukaan. Keterbukaan itu diwujudkan dengan membuat partisi antar seksi yang tingginya hanya 120 cm, sehingga adanya

saling kontrol antara satu seksi dengan seksi lainnya. Begitu juga dengan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), didesain sedemikian rupa dengan mencontoh *Counter* Bank dan Hotel. Untuk pengamanan terhadap peralatan komputer yang ada di Tempat Pelayanan Terpadu, maka monitor komputer juga dilengkapi dengan meja serba-serbi untu Wajib Pajak, meja pelayanan pelanggan (*customer service*) dan penyediaan *space bank* untuk masa yang akan datang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Langkah ini sebagai upaya menerapkan *good cooperate governance* dan pelayanan prima dalam pengelolaan pajak. Untuk implementasinya, maka sebagai *pilot project* dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*, LTO) yang dilayani adalah wajib pajak badan dalam kategori besar pada skala nasional dengan jumlah yang terbatas. Selanjutnya dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Taxpayers Office*, STO) yakni Kantor Pelayanan Pajak yang selama ini telah ada dan dikembangkan dengan menerapkan prinsip modernisasi administrasi perpajakan, yang dilayani adalah wajib

pajak diluar yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama pertama kali dibentuk melalui keputusan Menteri Keuangan No.254/KMK.01/2004 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta I (kini Jakarta Pusat). Kemudian dengan peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007 ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP yang ada di pulau Jawa dan Bali secara bertahap saat mulai beroperasi sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Dan pada tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Wajib pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah wajib pajak menengah kebawah, yakni jenis badan selain yang telah dikelola di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, serta orang pribadi. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah wajib pajaknya dapat selalu bertambah seirama dengan pertambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas memiliki visi dan misi. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi

   Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

   a) Politik

      Mendukung demokrasi bangsa

   b) Kelembagaan

      Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

   c) Fiskal

      Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

   d) Ekonomi

      Mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

KPP Pratama Bandung Cicadas menempati kantor baru di Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung terhitung 1 Juli 2002.

Dalam gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ini, dijabarkan sejarah instansi dan struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada di dalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti.

4. 1. 2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melaui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokkan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi.

Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak secara umum telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Mneteri

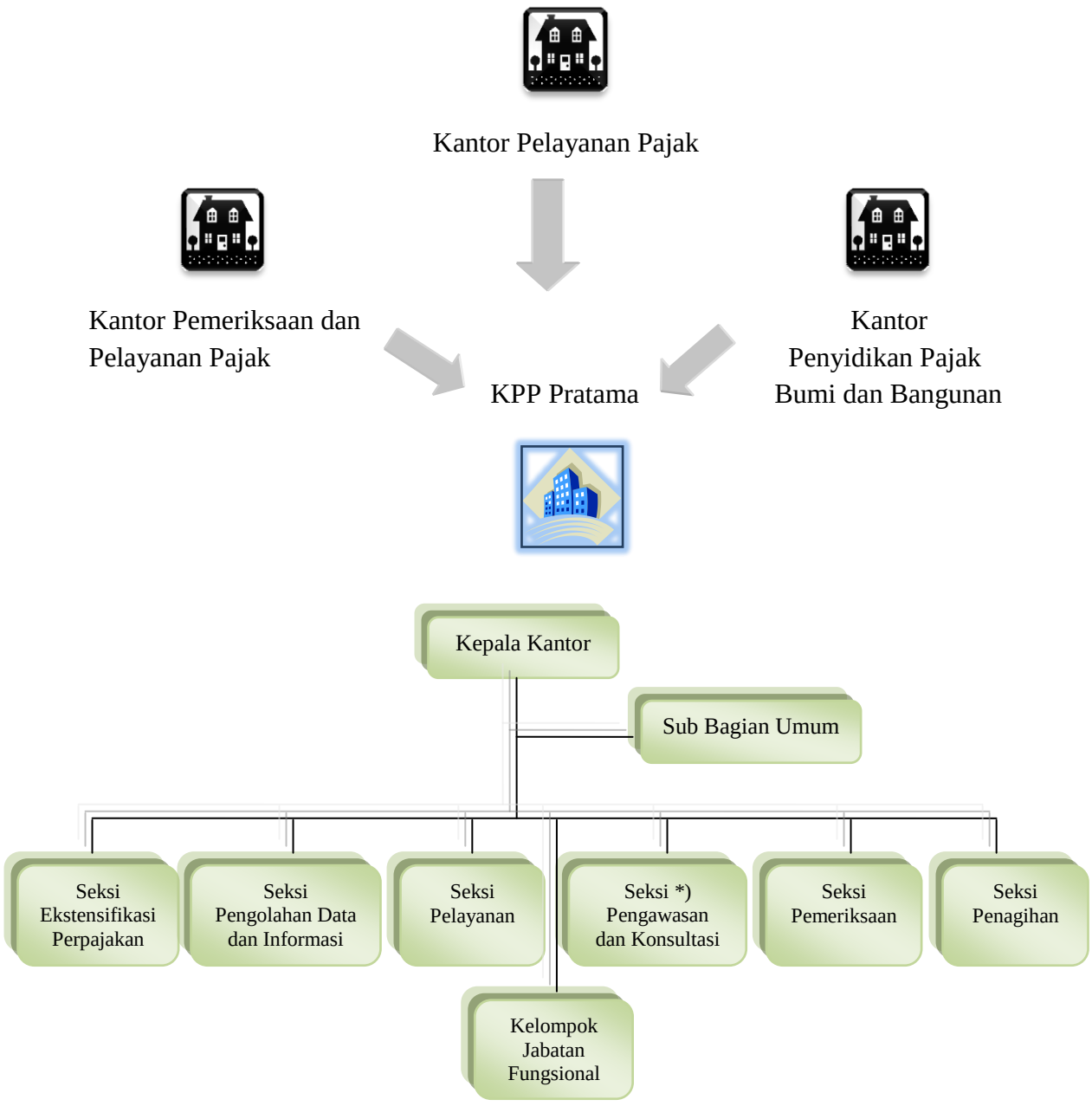
Keuangan RI Nomor 433/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas



*) Ada 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Sumber : KPP Pratama Bandung Cicadas

4. 1. 3 Deskripsi Jabatan

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah sebagi berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Melakukan Penyuluhan (Membina karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya) ;
   b. Melakukan peningkatan pelayanan ;
   c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan opersional perpajakan, yaitu :
      - Pajak Penghasilan (PPh),
      - Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
      - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
      - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
      - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
      - Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
   d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan urusan kepegawaian ;

b. Melakukan urusan keuangan ;

c. Melakukan urusan tata usaha ;

d. Rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan;

b. Pendataan objek dan subjek pajak ;

c. Penilaian objek pajak ;

d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan pengolahan data ;

b. Penyajian informasi perpajakan ;

c. Perekaman dokumen perpajakan ;

d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan ;

e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB ;

f. Pelayanan dukungan teknis komputer ;

g. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling* ;

h. Penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan mellakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan ;
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya ;
d. Penyuluhan perpajakan ;
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak ;
f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP) ;
b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak ;
c. Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak ;
d. Analisis kinerja Wajib Pajak ;
e. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi ;
f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan ;
g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

h. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan ;
i. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat *company profile* ;
j. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak ;
k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana pemeriksaan ;
b. Pengawasan aturan pemeriksaan ;
c. Penerbitan dan penyaluran SP4 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak) ;
d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif ;
b. Piutang pajak ;
c. Penundaan angsuran tunggakan pajak ;
d. Usulan penghapusan piutang pajak ;

e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

   Terdiri dari :

   a. Pejabat Fungsional Pemeriksa : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.
   b. Pejabat Fungsional Penilai : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4. 1. 4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ialah memberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain :

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.

2. Melakukan kegiatan opersional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada wajib pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

Mengadakan Kegiatan Penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Perkembangan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Analisis perkembangan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Bandung Cicadas digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada triwulan yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak

triwulan sebelumnya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Bandung Cicadas dari triwulan I tahun 2007 sampai dengan triwulan IV tahun 2009.

Berikut ini penulis sajikan jumlah perkembangan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa per triwulan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

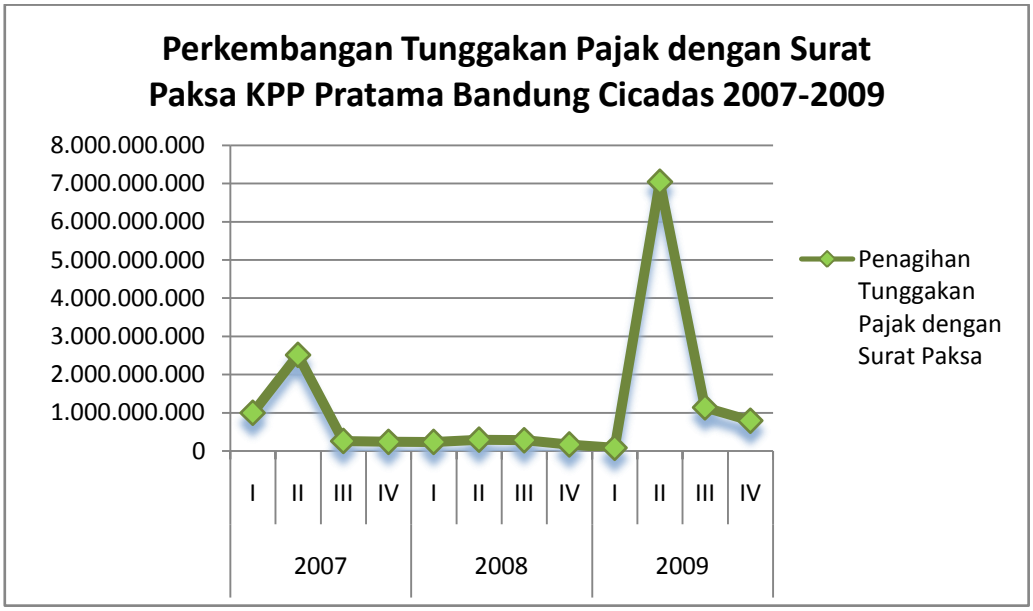
Tabel 4,1
Perkembangan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2007-2009

Dalam Rupiah

Tahun	Triwulan	Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	Perkembangan (dalam Rupiah)	Perkembangan (dalam %)
2007	I	997,437,109	0	
	II	2,513,464,970	1,516,027,861	152
	III	260,034,557	(2,253,430,413)	(89,7)
	IV	239,422,762	(20,611,795)	(7,9)
2008	I	235,177,616	(4,245,146)	(1,8)
	II	296,352,680	61,175,064	26
	III	280,842,265	(15,510,415)	(5,2)
	IV	168,447,328	(112,394,937)	(40)
2009	I	83,272,289	(85,175,039)	(50,1)
	II	7,045,387,614	6,962,115,325	8360,7
	III	1,142,198,411	(5,903,189,203)	(83,8)
	IV	793,839,698	(348,358,713)	(30,5)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas Data Diolah

Data-data dari tabel diatas apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan tampak seperti grafik dibawah ini :



Sumber: Laporan Penagihan Pajak seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas

Gambar 4.2
Grafik perkembangan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa 2007-2009 KPP Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan tabel dan grafik perkembangan penagihan tunggakan pajak pada KPP Pajak Pratama Bandung Cicadas selama tiga tahun terakhir, yaitu dari triwulan I tahun 2007 sampai dengan triwulan IV tahun 2009 mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup *fluktuatif*.

Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Bandung Cicadas pada triwulan I tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 997,437,109 sedangkan pada triwulan II penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar

Rp.2,513,464,970 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 1,516,027,861 atau sebesar 152%. Kemudian pada triwulan III tahun 2007 penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp. 260,034,557 berarti mengalami penurunan sebesar Rp.2,253,430,413 atau sebesar 89,7%. Dan pada akhir triwulan IV penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp. 239,422,762 berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 20,611,795 atau sebesar 7,9%. Peningkatan jumlah tunggakan pajak yang paling besar terjadi pada triwulan II, hal ini disebabkan tedapat sejumlah perusahaan besar yang menunggak pajak dengan jumlah yang cukup besar. Kemudian pada triwulan berikutnya cukup baik dengan mengalami penurunan hingga akhir triwulan tahun 2007.

Pada triwulan I tahun 2008 penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp. 235,177,616 berarti mengalami penurunan sebesar Rp 4,245,146 atau sebesar 1,8%. Pada triwulan II penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp.296,352,680 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 61,175,064 atau sebesar 26%. Pada triwulan III penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp.280,842,265 berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 15,510,415 atau sebesar 5,2%. Kemudian pada akhir triwulan IV penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp. 168,447,328 berarti kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 112,394,937 atau sebesar 40%. Pada awal triwulan tahun 2008 penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa tetap mengalami penurunan sebelum kemudian mengalami peningkatan pada triwulan II. Selanjutnya pada triwulan III dan IV kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pada triwulan I tahun 2009 penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp. 83,272,289 berarti mengalami penurunan sebesar Rp 85,175,039 atau sebesar 50,1%. Pada triwulan II penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp.7,045,387,614 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,962,115,325 atau sebesar 8360,7%. Pada triwulan III penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp.1,142,198,411 berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 5,903,189,203 atau sebesar 83,8%. Kemudian pada akhir triwulan IV penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp. 793,839,698 berarti kembali mengalami penurunan sebesar Rp.348,358,713 atau sebesar 30,5%. Pada awal triwulan tahun 2009 penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa tetap mengalami penurunan sebelum pada triwulan II mengalami peningkatan yang sangat besar. Kemudian pada triwulan III dan IV mengalami penurunan meskipun jumlah tunggakan pajak cukup besar. Hal tersebut disebabkan seksi penagihan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas melakukan pemeriksaan kembali terhadap sejumlah perusahaan yang diduga bermasalah, sehingga tunggakan pajak pun meningkat dengan jumlah yang cukup besar.

4.2.2 Perkembangan Pelunasan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Pelunasan tunggakan pajak merupakan pembayaran atas utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak. Dengan pelunasan tunggakan pajak pendapatan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas akan mengalami

peningkatan, sehingga membantu target penerimaan pendapatan negara yang berasal dari pajak.

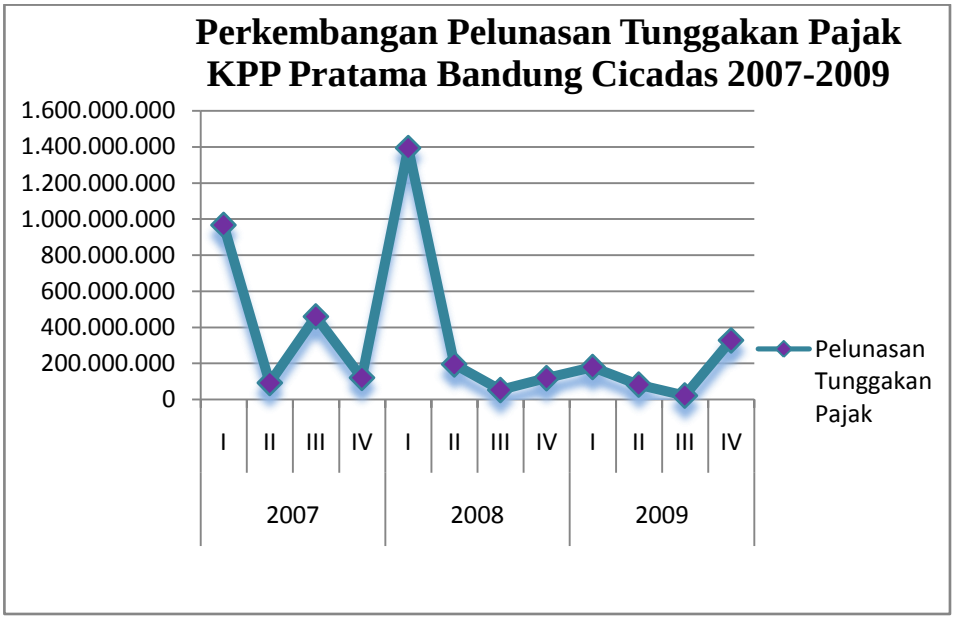
Adapun perkembangan pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dalam 3 tahun terakhir yaitu dari triwulan I tahun 2007 sampai dengan triwulan IV tahun 2009 disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.2
Perkembangan Pelunasan Tunggakan Pajak
KPP Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2007-2009

Tahun	Triwulan	Pelunasan Tunggakan	Perkembangan (dalam Rupiah)	Perkembangan (dalam %)
2007	I	966,914,977	0	-
	II	91,965,393	(874,949,584)	(90,5)
	III	459,475,909	367,510,516	399,6
	IV	120,659,781	(338,816,128)	(73,7)
2008	I	1,393,222,998	1,272,563,217	1054,7
	II	194,660,277	(1,198,562,721)	(86)
	III	53,086,979	(141,573,298)	(72,7)
	IV	118,634,937	65,547,958	123,5
2009	I	179,367,277	60,732,340	51,2
	II	82,545,213	(96,822,064)	(54)
	III	21,608,535	(60,936,678)	(73,8)
	IV	327,430,171	305,821,636	1415,3

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas Data Diolah

Data-data dari tabel diatas apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan tampak seperti grafik dibawah ini :



Sumber: Laporan Penagihan Pajak seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas

Gambar 4.3
Grafik perkembangan Pelunasan Tunggakan Pajak
KPP Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan tabel dan grafik perkembangan pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pajak Pratama Bandung Cicadas selama tiga tahun terakhir, yaitu dari triwulan I tahun 2007 sampai dengan triwulan IV tahun 2009 mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup *fluktuatif*.

Pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas pada triwulan I tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 966,914,977 sedangkan pada triwulan II pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 91,965,393 berarti mengalami penurunan sebesar Rp 874,949,584 atau sebesar 90,5% . Kemudian pada triwulan III

tahun 2007 pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 459,475,909 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 367,510,516 atau sebesar 399,6%. Dan pada akhir triwulan IV pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 120,659,781 berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 338,816,128 atau sebesar 73,7%. Pelunasan tunggakan pajak sepanjang tahun 2007 mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan sejumlah penanggung pajak melakukan banding, mengajukan keberatan, dan mengajukan permohonan angsuran.

Pada triwulan I tahun 2008 pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp.1,393,222,998 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 1,272,563,217 atau sebesar 1054,7%. Pada triwulan II pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 194,660,277 berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 1,198,562,721 atau sebesar 86%. Pada triwulan III pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 53,086,979 berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 141,573,298 atau sebesar 72,7%. Kemudian pada akhir triwulan IV pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 118,634,937 berarti kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 65,547,958 atau sebesar 123,5%. Pada awal triwulan tahun 2008 pelunasan tunggakan pajak mengalami peningkatan yang sangat besar sebelum pada triwulan II mengalami penurunan hingga triwulan III. Akan tetapi pada triwulan IV kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada triwulan I tahun 2009 pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp.179,367,277 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 60,732,340 atau sebesar 51,2%. Pada triwulan II pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 82,545,213

berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 96,822,064 atau sebesar 54%. Pada triwulan III pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 21,608,535 berarti mengalami penurunan sebesar Rp.60,936,678 atau sebesar 73,8%. Kemudian pada akhir triwulan IV pelunasan tunggakan pajak yaitu sebesar Rp. 327,430,171 berarti kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.305,821,636 atau sebesar 1415,3%. Pada awal triwulan tahun 2009 pelunasan tunggakan pajak mengalami peningkatan cukup bagus sebelum pada triwulan II mengalami penurunan kembali hingga triwulan III. Kemudian pada triwulan IV kembali mengalami peningkatan yang sangat baik.

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa setiap tahunnya pelunasan tunggakan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan oleh perusahaan – perusahaan yang menunggak pajak mengajukan keberatan, banding dan atau mengajukan permohonan angsuran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.

4.2.3 Analisis Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

Untuk mengetahui Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dilakukan analisis atau pengolahan data. Di dalam pengelolaan data penulis menggunakan perhitungan secara statistik maupun dengan pengujian menggunakan program *SPSS*. Dimana perhitungan yang dilakukan penulis dengan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai

variabel X yang mempunyai pengaruh terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak sebagai variabel Y adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Variabel X dan Variabel Y

No	X Penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa	Y Pelunasan Tunggakan pajak	X^2	Y^2	XY
1	997,437,109	966,914,977	994,880,786,410,278,000	934,924,572,746,911,000	964,436,879,307,682,000
2	2,513,464,970	91,965,393	6,317,506,155,417,100,000	8,457,633,509,644,450	231,151,793,757,783,000
3	260,034,557	459,475,909	67,617,970,834,186,200	211,118,110,951,376,000	119,479,614,448,987,000
4	239,422,762	120,659,781	57,323,258,963,708,600	14,558,782,750,968,000	28,888,698,029,335,100
5	235,177,616	1,393,222,998	55,308,511,067,443,500	1,941,070,322,156,110,000	327,654,863,226,013,000
6	296,352,680	194,660,277	87,824,910,943,182,400	37,892,623,441,716,700	57,688,094,778,492,400
7	280,842,265	53,086,979	78,872,377,810,330,200	2,818,227,339,346,440	14,909,067,424,367,400
8	168,447,328	118,634,937	28,374,502,310,339,600	14,074,248,276,994,000	19,983,738,145,098,300
9	83,272,289	179,367,277	6,934,274,115,299,520	32,172,620,058,394,700	14,936,323,727,487,100
10	7,045,387,614	82,545,213	49,637,486,631,504,600,000	6,813,712,189,215,370	581,563,021,265,192,000
11	1,142,198,411	21,608,535	1,304,617,210,090,920,000	466,928,784,846,225	24,681,234,341,037,900
12	793,839,698	327,430,171	630,181,466,120,731,000	107,210,516,881,089,000	259,927,068,062,728,000
∑	14,055,877,299	4,009,572,447	59,266,928,055,588,100,000	3,311,578,299,086,610,000	2,645,300,396,514,200,000

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui efek perubahan yang terjadi pada Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Perhitungan dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Untuk mendapatkan nilai a digunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma xy)}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$a = \frac{(4.01E+09)(5.93E+19) - (1.41E+10)(2.65E+18)}{12(5.93E+19) - (1.41E+10)^2}$$

$$a = \frac{(2.37635E+29) - (3.7182E+28)}{(7.11203E+20) - (1.98E+20)}$$

$$a = \frac{-2.00453E+29}{5.13635E+20}$$

$$a = 390263218.7$$

Untuk mendapatkan nilai b digunakan rumus sebagai berikut :

$$b = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$b = \frac{12(1{,}516{,}596{,}722{,}335{,}310\text{E} + 21) - (14{,}055{,}877{,}299)(4{,}009{,}572{,}447)}{16(59{,}266{,}928{,}055{,}588{,}100{,}000) - (14{,}055{,}877{,}299)^2}$$

$$b = \frac{(3.17436\text{E} + 19) - (5.63581\text{E} + 19)}{(7.11203\text{E} + 20) - (1.97567\text{E} + 20)}$$

$$b = \frac{-2.46145\text{E} + 19}{5.13635\text{E} + 20}$$

$$b = -0.04792203$$

Perhitungan dengan menggunakan *SPSS Versi 13 for windows* didapatkan hasil sebagai berikut :

Coefficients(a)

a Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan

Tabel 4.4
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	390263218.687	147032134.937		2.654	.024
	Surat Paksa	-.048	.066	-.223	-.724	.485

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan

Dari perhitungan dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana maupun dengan penggunaan program *SPSS Ver. 13 for windows* tersebut diatas.

Diperoleh nilai a = 390263218.7 sedangkan untuk nilai b = −0.04792203. Maka didapatkan persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = 390263218.7 - 0.04792203X$$

Untuk nilai :

a = 390263218.7

Adalah konstanta, yang artinya menunjukan Pelunasan tunggakan pajak sebagai variabel Y dimana pada saat Penagihan dengan Surat Paksa nol (atau disaat X = 0) atau tidak berubah adalah 390263218.7.

b = −0.04792203

Adalah setiap terjadi kenaikan pada Penagihan pajak dengan Surat Paksa maka Pelunasan Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.04792203x pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

2. Analisis Korelasi Product Moment

Untuk mengetahui hubungan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai variabel X dengan Pelunasan Tunggakan Pajak sebagai variabel Y pada KPP Pratama Bandung Cicadas adalah sebagai berikut :

Perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2\}\{n(\Sigma y^2) - (\Sigma y)^2\}}}$$

Didapatkan :

$$r = \frac{12(2.65\text{E}+18)-(1.41\text{E}+10)(4.01\text{E}+09)}{\sqrt{\{12(5.93\text{E}+19)-(1.41\text{E}+10)^2\}\{12(3.31\text{E}+18)-(4.01\text{E}+09)^2\}}}$$

$$r = \frac{(3.17436\text{E}+20)-(5.63581\text{E}+19)}{\sqrt{\{7.11203\text{E}+20-1.97567\text{E}+20\}\{3.97389\text{E}+19-1.60766\text{E}+19\}}}$$

$$r = \frac{-2.46144\text{E}+20}{\sqrt{(5.13635\text{E}+20)(2.36622\text{E}+19)}}$$

$$r = \frac{-2.46144\text{E}+20}{\sqrt{1.21538\text{E}+40}}$$

$$r = \frac{-2.46144\text{E}+20}{1.10244\text{E}+20}$$

$r = -0.22327213$

$r = -0{,}223$

Perhitungan dengan menggunakan *SPSS Versi 13 for windows* didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
Correlations

		Surat Paksa	Pelunasan Tunggakan
Surat Paksa	Pearson Correlation	1	-.223
	Sig. (1-tailed)		.485
	N	12	12
Pelunasan Tunggakan	Pearson Correlation	-.223	1
	Sig. (1-tailed)	.485	
	N	12	12

Untuk mengetahui tingkat hubungan koefisien korelasi digunakan pedoman interpretasi korelasi sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Besarnya Nilai	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2007:231)

Dengan demikian korelasi yang didapat sebesar - 0,223 , Nilai korelasi tersebut jika mengacu pada interpretasi nilai korelasi menunjukan hubungan yang rendah dan berarah negatif karena nilai r adalah negatif. Artinya, jika ada kenaikan variabel independen “X” (Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa) akan menyebabkan variabel dependen “Y” (Pelunasan Tunggakan Pajak) menurun.

3. Perhitungan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya persentase (%) pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Perhitungan dengan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$Kd = r^2 x100\%$$

Didapatkan :

$$Kd = (-0{,}223)^2 x100\%$$

Kd = 0,050 x 100%

$Kd = 5\%$

Perhitungan dengan menggunakan program *SPSS Versi 13 for windows* didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,223[a]	,050	-,045	432846141

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa

Dari hasil perhitungan dengan penggunaan rumus koefisien determinasi dan penggunaan program *SPSS Ver. 13 for windows*, diperoleh bahwa nilai Kd = 5 % (rumus koefisien determinasi) dan Kd = 0,050 atau 5% (*SPSS Ver. 13 for windows*) yang berarti pengaruh yang ditimbulkan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak sebesar 5 % sedangkan sisanya sekitar 95% ditimbulkan oleh faktor lainnya yaitu penanggung pajak sedang melakukan banding, sedang mengajukan keberatan, dan atau mengajukan permohonan angsuran dalam melakukan pelunasan tunggakan pajak.

4. Pengujian Hipotesis

Setelah nilai korelasi diperoleh, untuk lebih memastikan hasil perhitungan baik yang menggunakan rumus maupun yang menggunakan program *SPSS Ver. 13 for windows* dan untuk mengetahui apakah Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa mempengaruhi pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Maka penulis menggunakan statistik uji (uji t) dengan maksud untuk menguji signifikan koefisien korelasi.

Dalam melakukan pengujian hipotesis ini langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

Rumus hipotesis statistik yang digunakan penulis adalah :

1. Jika Ho : $\rho = 0$, maka Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Jika H_1 : $\rho \neq 0$, maka Ho ditolak yang berarti ada pengaruh Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Dengan daerah kritis, nilai t tabel yang diperoleh adalah :

1. Tabel distribusi t dengan derajat kebebasan (*degree of freedom* = df = n-2) , df = 12 – 2 = 10, maka didapatkan nilai df = 10
2. Tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05)

3. Uji dua pihak dengan menggunakan menggunakan t_{tabel}, didapatkan t_{tabel} = 2,228
4. Pengambilan keputusan

   Adapun pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

   Ho diterima jika $-t_{tabel} \leq -t_{hitung}$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

   H_1 diterima jika $-t_{tabel} > -t_{hitung}$ atau $t_{hitung} > t_{table}$

   Untuk mengetahui nilai t_{hitung} digunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Didapatkan :

$$t_{hitung} = -0,223\sqrt{\frac{12-2}{1-(-0.223)^2}}$$

$$t_{hitung} = -0,223\sqrt{10,5263}$$

$$t_{hitung} = -0.72350699$$

Perhitungan dengan menggunakan program *SPSS Versi 13 for windows* didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8 Coefficients(a)

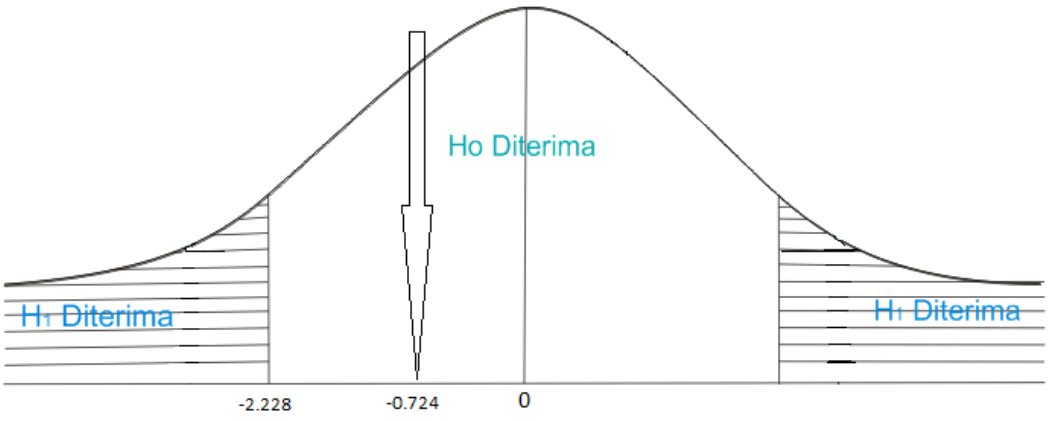
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	390263218.687	147032134.937		2.654	.024
	Surat Paksa	-.048	.066	-.223	-.724	.485

a Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak

Sumber : Data hasil pengelolaan program *SPSS Ver. 13 for windows*

Dari hasil perhitungan dengan penggunaan rumus t_{hitung} dan penggunaan program *SPSS Ver. 13 for windows*, didapatkan nilai t_{hitung} sebesar -0,724 yang berarti nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$.

Berikut ini gambar yang menerangkan daerah penerimaan dan penolakan Ho, yang telah dihitung.



Sumber : Data pengelolan t_{hitung} terhadap t_{tabel}

Gambar 4.4
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

Berdasarkan perhitungan nilai t_{hitung} dan program *SPSS Ver. 13 for windows* sebesar -0,724 dan berdasarkan tabel distribusi t, nilai t_{tabel} sebesar 2,228 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan bahwa rumus hipotesis statistik menunjukan Ho diterima dan yang berarti terdapat sedikit pengaruh tidak signifikan Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Hal ini disebabkan karena penanggung pajak melakukan serangkaian tindakan, diantaranya adalah dengan mengajukan keberatan, mengajukan banding, dan atau mengajukan permohonan angsuran dalam pembayaran tunggakan pajak.